

Analisis Masalah

Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inisiatif ini?

Posyandu merupakan milik masyarakat dan dilaksanakan atas dasar kebutuhan masyarakat. Aparatur Pemerintah hanyalah sebagai pembimbing. Posyandu yang berfungsi sebagai wadah pemberdayaan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang rutin dan bervariasi. Untuk itu pokjnal posyandu sebagai pembina posyandu hendaknya memahami kondisi masing-masing posyandu, permasalahan yang dihadapi dan senantiasa siap membantu memenuhi kebutuhan posyandu. Hanya dengan berkoordinasi secara intensif, bertukar informasi dan bermusyawarah antar anggota Pokjnal Posyandu, bisa lahir kesepahaman, keintegrasian dan saling mendukung dalam pengembangan posyandu.

Berbagai permasalahan yang terjadi dalam posyandu hanya bisa diselesaikan apabila adanya koordinasi yang baik antar berbagai SKPD yang terkait dengan posyandu. Pokjnal posyandu sebagai wadah koordinasi yang strategis untuk mendiskusikan dan merumuskan berbagai hal yang perlu dilakukan agar perkembangan posyandu menjadi lebih baik. Dengan demikian, koordinasi ataupun pemasukan data data Pokjnal baik di tingkat Desa maupun Kecamatan secara berkala sangat penting artinya dalam rangka pemutakhiran data data yang ada dengan cepat tepat dan akurat maka pemanfaatan teknologi informasi sangat penting dan tidak bisa ditawar lagi dan merupakan solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi pada posyandu sehingga peran posyandu dalam peningkatan kesehatan masyarakat menjadi optimal.

Sedangkan perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi dalam tatanan kehidupan pada saat ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi berbagai macam jenis dan teknologi yang memudahkan manusia untuk keperluan sehari hari berkembang semakin pesat dan inovatif di mana teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang tidak terbatas oleh batas ruang dan waktu juga merupakan sebagai jendela dunia yang dapat mengetahui semua informasi dengan tepat waktu / on time , Teknologi informasi komunikasi merupakan suatu, bentuk integrasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, data data, regulasi dan sumber daya manusia yang kreatif serta inovatif. Penyimpanan informasi dibutuhkan untuk mendukung praktik Dalam sistem informasi tentunya membutuhkan pencatatan dan pelaporan yang dimulai dari input, proses dan output data. Sistem informasi Pokajanal Posyandu di diperlukan yang dimulai dari

pengkajian sampa dengan evaluasi yang di dalamnya memerlukan peran serta masyarakat. Pada pengkajian, tentunya dibutuhkan data dan informasi yang perlu dikoordinasikan dari bawah ke atas serta dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat umum yang memerlukan data data tersebut secara online

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh posyandu pokjanel KBB adalah dari berbagai masalah yg dihadapi salah satunya adalah dari sisi geografis KBB yang berbukit, bergunung dan dari sisi kemampuan para kader yang berbeda dengan tingkat partisipasi yang berbeda cukup menyulitkan untuk dapat berkoordinasi dan berinteraksi dengan cepat dan akurat sehingga berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh para kader posyandupokjanel KBB menjadi terhambat dan kurang efektif maka dari itu dibutuhkan suatu inovasi yang cepat tepat, murah dan dapat diakses oleh para kader posyandu dengan tidak terbatas oleh ruang dan waktu di berbagai lokasi terpencil dan tersebar di 165 Desa dengan jumlah kader 2210 orang atas dasar tersebut maka atas dasar tersebut dibutuhkan suatu media yang dapat mengakomodir hal tersebut.

Pendekatan Strategis

Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah memecahkan masalah tersebut?

Pendekatan strategis yang diharapkan adalah stem Informasi Posyandu merupakan kegiatan yang menghasilkan suatu informasi yang terjadi di posyandu meliputi data umum posyandu, pelayanan posyandu, data pengguna posyandu berupa :

1. Pencatatan Master Data Posyandu
2. Pencatatan Data Umum Posyandu
3. Pencatatan Kegiatan Posyandu
4. Pencatatan Sarana Posyandu
5. Pencatatan Pembinaan Posyandu Per Desa

Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi posyandu berbasis komputer dimana memerlukan kader posyandu sebagai SDM yang mampu mengoperasikannya serta jaringan yang baik tersebut maka dapat dikembangkan pelatihan kader dalam mengoperasikannya Tentunya, diperlukan pengembangan sistem informasi berbasis informasi teknologi dan berbasis masyarakat terkoordinir dan terdokumentasi dengan baik. Sehingga

mudah dipantau serta akan lebih mudah dalam membuat rencana kegiatan dan diperlukan pendataan, perencanaan sampai dengan evaluasi dari kegiatan setiap tahunnya dengan mengikutsertakan masyarakat dalam hal ini kader dan dengan berbasis teknologi informasi tersebut, maka koordinasi antara pengurus Pokjnal Posyandu kabupaten, Kecamatan, Desa, Dinas Terkait, puskesmas para kader dan masyarakat yang berpartisipasi di posyandu.

Dalam rangka pelaksanaan Pokjnal posyandu berbasis teknologi informasi maka perlulah kiranya dilaksanakan dengan beberapa tahap dengan mengadakan kepelatihan kepelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi. Sehingga kegiatan ini dibagi menjadi empat tahap yaitu pengadaan perangkat penunjang yang berupa perangkat Teknologi Informasi dan bimbingan teknis kepada posyandu- posyandu dalam hal penggunaan teknologi informasi yang akan dikembangkan oleh Pokjnal Kab Bandung Barat, sehingga secara SDM akan meningkat dalam hal pengetahuan teknologi informasi yang pada akhirnya akan berdampak peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan tersebut dibagi menjadi 4 tahap yaitu

1. penyediaan dan pengadaan perangkat teknologi informasi baik software dan hardware beserta alat penunjang untuk ke SIM Pokjnal Posyandu /website interaktif
2. Untuk tahap kedua mengadakan bimbingan teknis / kepelatihan dan sosialiasi dalam meminimalisir gap pengetahuan teknologi para bagi kader posyandu Kab Bandung Barat
3. Untuk tahap selanjutnya tahap uji coba yang akan dilaksanakan di wilayah masing masing kader posyandu dan aparatur pemerintahan di SKPD dalam hal ini BPMPD sebagai fasilitator POKJANAL posyandu sehingga pada outputnya pengetahuan pemakaian SIM Pokjnal Posyandu dapat dilaksanakan dengan baik
4. Maintenance / pemeliharaan secara berkala sehingga pemakaian SIM Pokjnal Posyandu dapat berjalan dan terpantau secara menyeluruh

Setelah melaksanakan tahapan tahapan pendekatan ststegis tersebut maka dapat diperkirakan sejauh mana tingkat keberhasilan dengan sasaran baik partisipan para kader dan para pengurus Pokjnal Posyandu KBB, dikarenakan SIM Pokjnal Posyandu Kabupaten Bandung Barat merupakan Website berbasis data data dari para kader di berbagai wilayah di Kabupaten Bandung Barat sampai tingkat Desa dan Posyandu. Maka dari itu SIM Pokjnal Posyandu dengan sasaran yang terfokus kepada

1. Para kader di tingkat Pokjnal Posyandu
2. Para Pengurus terutama di tingkat Kecamatan Dan Desa

Sedangkan untuk para pengurus Pokjnal Posyandu sebagai penerima data data dari para Kader dan para pengurus di tingkat Kecamatan dan Desa

Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif

SIM Posyandu Pokjnal Kabupaten Bandung Barat merupakan hal yang unik dan menarik yang sebetulnya website interaktif yang cukup sederhana dan mudah dalam penggunaannya tetapi melibatkan hampir seluruh kader Posyandu Pokjnal seluruh KBB sehingga menjadi kaya fungsi dan sangat membantu dalam pelaksanaan dan berjalannya Posyandu Pokjnal baik dari segi data data yang tersedia maupun informasi keberadaan Posyandu Pokjnal KBB dikarenakan data data perposyandu per Kecamatan. per Desa baik data data dari tahun 2012, 2013, 2014 dapat disebutkan kreatif dan inovatif :

1. Merupakan terobosan sederhana tetapi inovatif dimana website ini berfungsi sebagai pemersatu dan sebagai sarana antara pengurus kader maupun antar kader walaupun berbeda wilayah
2. Website yang interaktif berbasis data yang diterima dari seluruh kader kader Pokjnal Posyandu KBB
3. Dapat dipergunakan oleh para kader dikarenakan friendly user baik untuk mengupload data, email, maupun download format format isian Posyandu Pokjnal
4. Dari data manual menjadi data elektronik

Pelaksanaan dan Penerapan

Bagaimana strategi ini dilaksanakan?

Pelaksanaan dan Penerapan dengan tahapan sebagai berikut

1. Tahap perencanaan yang meliputi koordinasi koordinasi Asisten Pembangunan (Asisten II) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa , Dinas Kesehatan Dan para pengurus Posyandu Pokjnal baik Ketua, Pelindung dan kader

posyandu pokjanal dan tahap perencanaan SIM Posyandu Pokjanal yang dalam perencanaan kedalaman isi konten SIM Pokjanal Posyandu Kabupaten Bandung Barat

2. Tahap pemilahan data yang terdiri dari a. Daftar Isian Data Posyandu (Sumber Data Untuk Mengisi Data Posyandu), b. Pencatatan master Data Posyandu (Nomor Urut, Tahun, Jenis , Nama , Alamat , Penanggung Jawab, Ketua Pelaksana, Sekretaris, Jumlah Kader , Petugas, Terintegrasi Program), c. Pencatatan Data Umum Posyandu (Tahun, Bulan, Jumlah Pengunjung, Jumlah Bayi, Jumlah Kematian Ibu hamil, salin, nifas, Jumlah Petugas), d. Pencatatan Kegiatan Posyandu, e. Pencatatan Sarana Posyandu (Komputer = Posyandu, Penjelasan Format Daftar Posyandu, Format Data Hasil Kegiatan Posyandu, Penjelasan Format Data Hasil Kegiatan Posyandu, Format Data Umum Posyandu, Penjelasan Format data Umum Posyandu, Format data Sarana Posyandu, Penjelasan Format Data Sarana Posyandu, Format data Pembinaan Per Desa, Penjelasan Format data Pembinaan) h. Format SIP Manual (Format 1 : Catatan Ibu hamil, Kelahiran, Kematian Bayi, Dan Kematian Ibu hamil, Melahirkan/Nifas, Format 2 : Register Bayi Dan Balita Dalam Wilayah Kerja Posyandu, Format 3 : Register WUS Dan PUS Dalam Wilayah Kerja Posyandu, Format 4 : Register Ibu hamil Di Wilayah Kerja Posyandu, Format 5 : Data Posyandu, Format 6 : Data Hasil Kegiatan Posyandu).
3. Tahapan pembangunan / Development SIM Pokjanal Posyandu dalam hal ini Asisten II, BPMPD sebagai core / urusan dengan bekerjasama dengan pihak pengembang maupun tim Informasi teknologi Kabupaten Bandung barat dalam hal ini Dishub Kominfo
4. Tahap sosialisasi dan bimtek yang dilaksanakan secara maraton dengan mengumpulkan seluruh pengurus Posyandu Pokjanal dari tingkat Kecamatan dan Desa per wilayah dalam hal ini bimbingan teknis dan tata cara pelaksanaan maupun sosialisasi SIM Posyandu Posyandu dilaksanakan dengan mengupgrade maupun membimbing para pengurus tata cara teknis menggunakan SIM Posyandu pokjanal Kabupaten Bandung Barat yang diharapkan pemahaman penggunaan dapat dilakukan secara merata oleh para pengurus
5. Tahap uji coba dalam hal ini dilaksanakan selama beberapa Bulan yang terus dipantau oleh tim Posyandu Pokjanal baik dari sisi data data yang masuk maupun data data yang diupload sehingga dapat terlihat dan diperkirakan kekurangan SIM Pokjanal Posyandu tersebut maupun tingkat partisipasi para pengurus di tingkat Kecamatan dan desa dalam tahapan ini cukup berat dan riskan dikarenakan sering terjadinya

keterlambatan data data yang masuk sehingga para pengurus Pokjandal Posyandu Kabupaten harus terus memberikan dorongan kepada para pengurus maupun kader di tingkat Kecamatan dan Desa

6. Tahapan ini merupakan tahapan mengevaluasi seluruh kegiatan dari tahapan 1 sampai tahapan 5 yang meliputi sisi teknis / kedalaman konten maupun penggunaan SIM Pokjandal Posyandu Kabupaten Bandung Barat oleh para pengurus maupun para kader, mengevaluasi seluruh kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan tahapan uji coba sehingga dapat direvisi maupun dikembangkan untuk mempermudah maupun meningkatkan fungsi fungsi yang telah ada dan mengevaluasi kesulitan dan permasalahan yang ada di tingkat pengurus Kabupaten, Kecamatan dan Desa maupun para kader
7. Tahapan ini merupakan tahapan dalam penentuan berhasil atau tidaknya SIM Pokjandal Posyandu Kabupaten Bandung Barat yaitu pelaksanaan teknis sehari hari yang meliputi alur data masuk maupun bertambah data data yang telah ada sehingga dapat dikatakan dapat berjalan dengan baik apabila penggunaan SIM Posyandu Pokjandal Kabupaten Bandung Barat fluktuasi data yang tampil ataupun masuk ke pengurus Kabupaten dapat tepat waktu dan update yang dilaksanakan secara berkala
8. Tahapan maintenace pada tahapan ini dilaksanakan secara berkala yaitu dengan melaksanakan berbagai kerusakan SIM Pokjandal Posyandu kabupaten Bandung Barat mapapun kekurangan kekurangan yang ada dan menambahkan data data yang kurang lengkap sehingga data data tersebut dapat lebih maksimal penggunaannya maupun dipergunakan berbagai kepentingan yang ada

Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?

Dalam pelaksanaan pemangku kepentingan dengan melibatkan SKPD yang berkepentingan dalam Pokajandal Posyandu Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini

Pengarah : 1. Bupati Bandung Barat

2. Wakil Bupati Bandung Barat

Penanggung : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat

Jawab : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat

Ketua : Daerah

Wakil Ketua 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

2. Kepala Dinas Kesehatan;

3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung Barat.

Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya dan Perekonomian Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Pada Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah.

Bendahara : Kepala Sub Bagian Bidang Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Anggota :

1. Bidang Kelembagaan;

- Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan partisipasi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
- Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Budaya Lokal Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya dan Perekonomian Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Kepala Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Kepala Sub bagian Bina Kesehatan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah;
- Ketua Forum Desa Siaga;
- Unsur Kementrian Agama Kabupaten Bandung Barat;

2. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana;

- Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Bidang pemberdayaan Perempuan Badan pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak pada Bidang Pelayanan Kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan;
- Ketua IBI Kabupaten Bandung Barat;

- Kepala Seksi gizi pada Dinas Kesehatan;
- Kepala Seksi Imunisasi pada Dinas Kesehatan;
- Kepala Seksi Surveilans pada Dinas Kesehatan;
- Kepala Seksi UKS pada Dinas Kesehatan;
- Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan;

3. Bidang Pengembangan Komunikasi, Informasi Posyandu serta Pengembangan Edukatif (KIE);

- Bidang KOMINFO pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Bandung Barat;
- Kepala Bidang Advokasi dan KIE pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- Kepala Bidang Catatan Sipil dan Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil;
- Kepala Sub Bidang Produksi Tanaman Hias, Buah dan tanaman Obat pada Bidang Hortikultura Dinas Pertanian perkebunan dan Kehutanan;
- UPTD Promosi Kesehatan Pada Dinas Kesehatan;
- Unsur Kantor Perpustakaan Arsip daerah Kabupaten Bandung Barat;
- Unsur Pokja IV TP. PKK Kabupaten Bandung Barat;

4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- Kepala bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- Kepala Sub Bidang Pendidikan Anak usia Dini pada Bidang Pendidikan Non formal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- Kepala Sub bagian Bina produksi dan distribusi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
- Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha pada Bidang Koperasi Dinas Perindustrian perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5. Bidang Bina Program

- Unsur Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat;

- Unsur Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat;
- Kepala Sub Bidang Pengembangan Fasilitas Umum pada Bidang Perumahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya pada Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya dan pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Kabid Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah;
- Bank Jabar Banten Bandung Barat;
- Forum BCSR Kabupaten Bandung Barat;

Sekretariat

Pelaksana pada Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa (6 orang)

Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inisiatif ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi?

Dasar pelaksanaan yang digunakan untuk inisiatif ini :

1. Undang-undang Dasar tahun 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Surat Edaran Mendagri Nomor 411.3/1116/SJ tahun 2001 tentang Revitalisasi Posyandu.
6. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
9. Undang-undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131 tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
13. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
14. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
15. Undang Undang No. Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia.
17. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 TAHUN 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika di Indonesia.
18. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 TAHUN 2003 , tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan EGovernment

Maka berdasarkan Undang Undang tersebut dalam hal ini Sumber yang digunakan untuk inisiatif ini dan partisipasi pihak swasta dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam Posyandu Pokjandal Kabupaten Bandung Barat

1. Asisten Pembangunan (Asisten II) sebagai koordinator Posyandu Pokjandal Kabupaten Bandung Barat dan Asisten Pemerintahan (asisten I)
2. Badan Pembangunan Desa sebagai tugas pokok dan fungsi pengembangan Posyandu dengan mendukung program program dan pembiayaan melalui APBD dan bantuan Provinsi Jawa barat
3. Dinas Kesehatan sebagai salah satu pendukung utama Posyandui Pokjandal
4. Dinas Perhubungan Kominfo sebagai suporting Informasi Teknologi (pelaksanaan teknis kegiatan SIM Pokjandal Posyandu Kabupaten Bandung Barat
5. Pihak swasta sebagai pihak ketiga (pembangunan / develop SIM Pokjandal Posyandu Kabupaten Bandung Barat)

Dalam melaksanakan kegiatan Pokjandal Posyandu Kabupaten Bandung Barat mendapat dukungan dana hibah yang dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan belanja daerah

(APBD) Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2013 sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah)

Dengan dipergunakan sebagai berikut ;

a. Kelengkapan Kesekretariatan Pokjandal Posyandu

1. ATK
2. sarana / prasarana sekretariat
3. pembuatan aplikasi SIM Pokajanal Posyandu
4. penyusunan Perhub Posyandu
5. dana Pembinaan untuk Pokajanal Posyandu Kecamatan
6. Dana pembinaan untuk petugas pendataan Posyandu tingkat Kecamatan
7. Seragam Pokjandal Posyandu

b. Kegiatan rapat pengurus Pokjandal

c. Kegiatan Rapat kerja Pokjandal Posyandu

d. Kegiatan Rapat Evaluasi Kegiatan Pokjandal Posyandu

e. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Revitalisasi Posyandu Kabupaten Bandung Barat

f. Kegiatan Rapat koordinasi posyandu untuk Camat dan Kades dalam rangka Revit Posyandu

g. Kegiatan Fasilitas Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten Bandung Barat

h. Kegiatan Fasilitas Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat

i. Kegiatan Fasilitas Lomba Posyandu Tingkat Nasional

j. Kegiatan pembinaan (Biaya operasional pengurus pokjandal posyandu)

Apa saja keluaran(output) yang paling berhasil?

Output yang paling berhasil

1. Menunjang terlaksananya informasi yang cepat dan akurat secara real time baik kepada pengurus Pokjandal Posyandu di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan

kader Pokjandal Posyandu maupun maupun petugas posyandu dan masyarakat yang membutuhkan.

2. Peningkatan SDM Pokjandal Posyandu di Kabupaten Bandung Barat
3. Sebagai penunjang dan alat bantu / peraga untuk seluruh kegiatan Pokjandal Posyandu
4. Terdapatnya dukungan Informasi teknologi berupa SIM Pokjandal Posyandu
5. menjadi acuan bagi kader untuk memahami permasalahan sehingga dapat mengembangkan kegiatan yang tepat dan sesuai kebutuhan
6. menyediakan informasi tepat guna dan tepat waktu mengenai pengelolaan Pokjandal Posyandu, agar berbagai pihak baik aparatur Pemerintahan dan masyarakat luas dapat memanfaatkan data data tersebut sebagai bahan acuan ataupun bahan dasar dan menggunakannya/ memanfaatkan isi konten Pokjandal Posyandu
7. untuk sebagai bahan acuan pembinaan yang berkesinambungan membina Pokjandal Posyandu Kabupaten Bandung Barat kedepannya
8. Tersedianya data data Pokjandal Posyandu yang akurat dan up to date
9. Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap kader Pojandal Posyandu pengetahuan (peningkatan SDM) baik aparatur Pemerintahan dan masyarakat
10. Tersedianya alat bantu / penunjang Posyandu Pokjandal Kabupaten Bandung Barat
11. Tersedianya data yang dapat menjadi acuan para kader dalam pengembangan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan
12. Tersedianya informasi tepat guna dan tepat waktu mengenai pengelolaan Pokjandal Posyandu, agar berbagai pihak dapat menggunakannya dan memaksimalkan potensi dan kegiatan yang dilaksanakan paratur Pemerintahan dalam kerangka Pokjandal Posyandu oleh para pengurus Kabupaten Bandung Barat

Sistem apa saja yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan?

Sistem yang diterapkan dalam mengevaluasi kegiatan pada dasarnya sistem Informasi Pokjandal Posyandu Kabupaten Bandung Barat pada dasarnya berbasis data kader di pokjandal posyandu masing masing di wilayah masing masing di seluruh Kabupaten Bandung Barat yang merupakan merupakan kegiatan yang menghasilkan suatu informasi yang terjadi di posyandu meliputi data umum posyandu, pelayanan posyandu, data pengguna posyandu Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi posyandu berbasis komputer dimana memerlukan kader posyandu sebagai SDM yang mampu mengoperasikannya serta jaringan yang baik

tersebut maka dapat dikembangkan pelatihan kader dalam mengoperasikannya. Tentunya, diperlukan pengembangan sistem informasi berbasis informasi teknologi dan berbasis masyarakat terkoordinir dan terdokumentasi dengan baik. Sehingga mudah dipantau serta akan lebih mudah dalam membuat rencana kegiatan dan diperlukan pendataan, perencanaan sampai dengan evaluasi dari kegiatan setiap tahunnya dengan mengikutsertakan masyarakat dalam hal ini kader dan dengan berbasis teknologi informasi tersebut, maka koordinasi antar posyandu, Dinas Terkait, puskesmas para kader dan masyarakat, maka dari itu pemantauan kemajuan dan mengevaluasi kegiatan :

Dalam memantau seluruh kegiatan dan berjalannya sistem tersebut dengan :

1. Memantau Sistem Informasi Pokjanel Posyandu Kabupaten Bandung Barat masuk dan uploadnya data secara berkala
2. Mengupgrade data para kader secara berkala dengan mengadakan pelatihan / Bimtek
3. Mengadakan pertemuan secara teratur para pengurus Kader (lintas Dinas)
4. Melibatkan Tim Teknologi Informasi di setiap kegiatan Pokjanel Posyandu Kabupaten Bandung Barat

Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi?

Permasalahan yang dihadapi dan berbagai kendala yang dihadapi :

1. Kesiapan Sumber Daya Manusia
 - a. kesiapan aparatur pemerintahan di tingkat Kabupaten masih terjadi perbedaan persepsi mengenai teknologi Informasi
 - b. Kesiapan dan pemahaman SDM di tingkat Kecamatan, Desa dan Pokjanel Posyandu masih terjadi gap yang cukup jauh
 - c. Masih terjadi perbedaan/ gap partisipasi dan ketertarikan para kader antar Pokjanel Posyandu di Kabupaten Bandung Barat yang tidak merata
 - d. Kurangnya SDM dalam menangani SIM Pokjanel Posyandu
2. Infrastruktur Yang Ada
 - a. Hardware yang masih kurang untuk mendukung SIM Pokajala Posyandu
Sarver hosting masih diluar (belum mempunyai server sendiri

- Perangkat pendukung lainnya masih minim (laptop, PC dll)
- b. Jaringan internet yang kurang baik (kurangnya benwidh untuk online sampai ke tingkat Kecamatan) / tidak meratanya jaringan internet di setiap Kecamatan dan belum adanya jaringan internet sampai ke tingkat Desa
 - c. di beberapa daerah belum terjangkau jaringan internet
 - d. Belum adanya ruangan khusus / tempat khusus bagi tim pengembangan Informasi teknologi Pokjanal Posyandu baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, desa dan di Posyandu
3. Data data yang masuk tidak berbarengan / bersamaan dan tidak meratanya data yang masuk ke Pokjanal Posyandu Kabupaten sehingga menyulitkan untuk mengatur ataupun merapikan data yang ada ataupun data yang baru masuk
 4. Faktor Geografis yang menyulitkan / alam di Kabupaten Bandung Barat yang berbukit, bergunung dan lembah serta cuaca yang dapat menghambat maupun merusak alat alat infrastruktur / perangkat Teknologi Informasi yang sudah tersedia (terpasang)
 5. Belum adanya Perda khusus mengenai dukungan Teknologi Informasi yang berhubunganj langsung dengan Pokajanal Posyandu
 6. Kurang terlibatnya peran dunia usaha / BUMN melalui program CSR yang dilibatkan dalam pengembangan SIM Pokajanal Posyandu di Kabupaten Bandung Barat

Dampak dan Berkelanjutan

Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini?

Dampak ataupun manfaat yang dihasilkan / efek positif

1. Tersedianya data data Pokjanal Posyandu yang akurat dan up to date
2. Mempermudah suatu keputusan bagi para pengambil kebijakan di jajaran pengurusan Posyandu Pokjanal dengan berdasarkan data data yang sudah tersedia di SIM Pokjanal Posyandu Kabupaten Bandung Barat
3. Tersedianya data data yang dapat menjadi acuan para kader Pokjanal Posyandu dalam pengembangan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan

4. Pemanfaatan data data SIM Pokjnal Posyandu Kabupaten Bandung Barat dapat dilakukan dengan tidak terkendala oleh ruang dan waktu
5. Penghematan biaya / lebih murah dikarenakan data dapat dimasukan/ diupload di daerah masing masing tanpa harus ke Pokjnal Posyandu Kabupaten
6. Meningkatkan pengetahuan mengenai teknologi informasi baik untuk SDM di tingkat Pokjnal Posyandu Kabupaten, Kecamatan, Desa, Pokjnal Posyandu dan para kader yang meliputi pengetahuan dasar Teknologi Informasi , pengetahuan dasar potensi dan pemanfaatannya, interaksi aplikasi yang berada di masing masing Pokjnal Posyandu
7. Meningkatkan kemampuan secara individu dalam penggunaan sistem teknologi informasi dan informatika secara maksimal dan optimal sesuai dengan tugas bidang kerja masing masing di pengurusan Pokjnal Posyandu lingkungan Pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Bandung barat
8. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan memaksimalkan peralatan elektronik dalam hal ini SIM Pokjnal Posyandu
9. Pemanfaatan sistem teknologi informasi Pokjnal Posyandu Kabupaten Bandung Barat yang maksimal sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pokajanal Posyandu Kabupaten Bandung Barat
10. Mempererat hubungan antar seluruh pengurus tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa maupun antara Para pengurus dengan Kader Pokjnal Posyandu Kabupaten Bandung Barat
11. Tersedianya informasi data tepat guna dan tepat waktu mengenai pengelolaan Posyandu Posyandu, agar berbagai pihak dapat menggunakannya dan dan memaksimalkan potensi dan kegiatan yang dilaksanakan paratur Pemerintahan dalam kerangka Pokjnal Posyandu
12. Data data di SIM Pokjnal Posyandu Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas baik masyarakat Kabuapten Bandung barat maupun di luar Kabupaten Bandung Barat
13. Sebagai salah satu sumber Informasi Publik yang dapat dimanfaatkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung oleh yang memerlukannya
14. Mengatasi masalah geografis di Kabuapten Bandung Barat yang mempunyai struktur Gunung , berbukit , lembah maupun daerah terpencil
15. Mengimplementasikan INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 , tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan E-

Government dan Mengimplementasikan KEPUTUSAN MENTRI KOMUNIKASI DAN INFORMASI NOMOR 57 TAHUN 2003 mengenai E-Government

16. Mengimplementasikan UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Apakah inisiatif ini berkelanjutan dan direplikasi?

Inisiatif berkelanjutan dan direplikasi dengan sasaran yang diharapkan adalah suatu Sitem Informasi Pokjnal Posyandu Kabupaten Bandung Barat merupakan kegiatan yang menghasilkan suatu informasi yang terjadi dan suatu proses di Pokjnal Posyandu meliputi data umum dan data data spesifik/ khusus dalam pelayanan Pokjnal Posyandu dan data pengguna posyandu Oleh karena itu, dimana SIM Pokjnal Posyandu melibatkan seluruh pengurus di tingkat kabupaten, Kecamatan, Desa dan seluruh kader maka sebagai SDM yang mampu mengoperasikannya serta jaringan yang baik tersebut maka dapat dikembangkan pelatihan kader dalam mengoperasikannya Tentunya, diperlukan pengembangan sistem informasi berbasis informasi teknologi dan berbasis masyarakat terkoordinir dan terdokumentasi dengan baik. Sehingga mudah dipantau serta akan lebih mudah dalam membuat rencana kegiatan dan diperlukan pendataan, perencanaan sampai dengan evaluasi dari kegiatan setiap tahunnya dengan mengikutsertakan masyarakat dalam hal ini kader dan dengan berbasis teknologi informasi tersebut dengan ruang lingkup :

1. Penyediaan perangkat keras (hardware) teknologi informasi dan komunikasi penunjang pokjnal posyandu
2. Penyediaan perangkat lunak (software) penunjang pokjnal posyandu
3. Kepelatihan / bimbingan teknis kader posyandu
4. Peralatan pendukung lainnya
5. Biaya umum/ oprasional Bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Kader Pokjnal Posyandu dan penyusunan Data Base SIM Pokjnal Posyandu Kabupten Bandung Barat

Maka diharapkan akan terus berkelanjutan dikarnakan menyangkut pada kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hal tersebut SIM Pokjnal Posyandu Kabupaten Bandung Barat telah berjalannya dari tahun 2013 sampai dengan sekarang dengan data data yang terus berganti dan up to date / terbaru, mengembangkan SIM Pokjnal Posyandu kabupaten Bandung Barat agar lebih dapat

bermanfaat dan berguna tidak saja oleh para pengurus maupun kader akan tetapi bermanfaat lebih luas ke bidang yang berbasis kemasyarakatan ataupun menjadi pengembangan menjadi suatu potensi per Desa di kabupaten Bandung Barat dan telah dapat terukur salah satunya adalah pada tahun

1. Tahun 2013 menjadi Juara Posyandu Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat
2. Tahun 2014 Menjadi Juara Posyandu Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat
3. Tahun 2014 Menjadi peraih Pakarti Utama III tingkat Nasional.

Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik?

Pembelajaran yang dapat dipetik diperlukan beberapa usulan dalam langkah strategis yang saling berkaitan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya dikarenakan sistem tersebut merupakan suatu sistem besar yang bersinergi maka dari itu :

1. Dalam implementasi pengembangan sistem teknologi informasi Pokjandal Posyandu Kabupaten Bandung Barat harus melalui tahapan tahapan dan berjenjang dimulai dari perencanaan, implementasi, pengawasan dan evaluasinya
2. Pengimplementasiannya sistem teknologi informasi Pokjandal Posyandu Kabupaten Bandung Barat dapat secara logik terukur dan realistik yang diperkuat dari segi perncannya yang tepat dan secara evisien dapat dilaksanakan
3. Penataan pada sistem kerja yang telah ada baik dari sisi manajerial dan proses kerja yang telah ada Posyandu Pokjandal sehingga dapat secara konsisten dan komit dengan pengadaptasian pada sistem sistem teknologi informasi Pokjandal Posyandu d Kabupaten Bandung Barat yang baru maupun pada tahap pengembangan
4. Pemanfaatan dari sisi teknologi yang tepat sehingga sistem tersebut terpakai dalam hal ini sederhana, mudah dioprasionalkan tetapi besar manfaat dan kegunaan dalam mempermudah proses pekerjaan maupun meberian informasi kepada masyarakat
5. Memaksimalkan dan mengoptimalkan peran DISHUB KOMINFO sebagai sentral pengembangan sistem teknologi informasi dan informatika Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sehingga dapat mengintegrasikan keseluruhan data base Pokjandal Posyandu Kabupaten Bandung Barat dengan Sistem Informasi yang lainnya (website Kabupaten Bandung Barat dll)
6. Peningkatan baik secara kualitas dan kuantitas dari sisi SDM yang telah ada

7. Penyelenggaraan kepelatihan dan bimbingan teknis baik persistem kegiatan maupun berkala (teratur) baik bagi internal pengurus Posyandu Pokjantal Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat ataupun melibatkan masyarakat
8. Penyelenggaran seminar ataupun sosialisasi terhadap masyarakat Kabupaten Bandung Barat mengenai SIM Pokjantal Posyandu i serta dilibatkan dalam beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat
9. Membentuk suatu komunitas ataupun steering comitee ke telematikaan yang berguna untuk mensupport ataupun mendorong kemajuan sistem teknologi informasi Pokjantal posyandu Kabupaten Bandung Barat dan membetuk komunitas – komunitas di masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang peduli terhadap perkembangan dunia Informasi dan Teknologi berbasis Pokjantal Posyandu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraa masyarakat
10. Lebih melibatkan dan meningkatkan peran serta dunia usaha yang ada di Kabupaten Bandung Barat
11. lebih melibatkan peran BUMN, Universitas ataupun pihak swasta lainnya dengan sistem / program CSR
12. Dibentuknya dari aturan dasar dan wewenang dalam pengelolaan pengembangan sistem teknologi informasi dan informatika Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dengan membuat aturan – aturan berupa Perda – Perda dan Keputusan Bupati yang mendukung perkembanga sistem teknologi informasi Pokjantal Posyandu dan informatika Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat pada umumnya
13. Membangun satu sistem portal yang dapat membagi informasi baik diperuntukan untuk aparatur Pemerintahan dan diperuntukan bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat dalam menunjang pengembangan SIM Pokajantal Posyandu Kabuapten Bandung Barat

